

TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH DAERAH DI ERA SOCIETY 5.0: STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA BARAT

Endang Try Setyasih

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Email: endang_try@ipdn.ac.id

Abstrak

Society 5.0 secara masif memanfaatkan teknologi Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence dan Robotic untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial. Tantangan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah saat ini adalah memanfaatkan sepenuhnya teknologi tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang lebih baik melalui transformasi digital tidak hanya akan berdampak pelayanan publik, tetapi juga akan dapat mengintensifkan keterlibatan warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Studi ini berfokus pada proses transformasi digital pemerintah daerah provinsi Jawa Barat menuju Provinsi Digital di era Society 5.0. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan transformasi digital pada pemerintahan daerah di Indonesia relatif masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain terutama di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat yaitu belum ada standarisasi terkait Implementasi, SDM yang kurang memadai, Infrastruktur masih belum merata, kurang keterlibatan Masyarakat dan kurang komitmen pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan transformasi digital salah satunya adalah mengimplementasikan West Java Digital Service (JDS) yang salah satu programnya adalah desa digital.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Pemerintah Daerah, e-Government, Society 5.0.

Abstract

Society 5.0 relies heavily on the Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, and Robotics to address a variety of social concerns and issues. The government, particularly local governments, faces the problem of maximizing the use of digital technology to improve public services and governance. Better governance facilitated by digital transformation will not only have an effect on public services, but will also increase citizen involvement and stimulate economic growth. This study examines the local government of West Java province's digital transition towards a digital province in the era of society 5.0. This study employs a qualitative approach and descriptive methodologies. The findings of the study indicate that digital transformation in local government in Indonesia lags behind other nations, particularly those in Southeast Asia. This is due to various constraining factors, including a lack of implementation uniformity, insufficient human resources, inconsistent infrastructure, a lack of community participation, and a lack of government commitment. The regional government of the province of West Java is undergoing a digital transformation, which includes the implementation of the West Java Digital Service (JDS), which includes a digital village as one of its initiatives.

Keywords: Digital Transformation, Local Government, e-Government, Society 5.0.

A. PENDAHULUAN

Society 5.0, atau hanya "masyarakat 5.0", adalah konsep yang dipromosikan oleh pemerintah Jepang. Menggabungkan dunia nyata dan dunia maya ke dalam pemecahan masalah, gagasan "masyarakat 5.0" bukan hanya tentang meningkatkan efisiensi produksi (Kurniawan & Andiyan, 2021). Konsep teknologi big data yang diperoleh oleh IoT dan diubah oleh Artificial Intelligence (AI) menjadi sesuatu yang dapat membantu manusia dan meningkatkan kualitas hidup mereka merupakan inti dari gagasan Society 5.0. Aman untuk mengatakan bahwa setiap aspek kehidupan modern, mulai dari kedokteran dan kesehatan masyarakat hingga transportasi dan ekonomi, pertanian, dan pendidikan, akan diubah oleh munculnya "Masyarakat 5.0" (Nastiti & Abdu, 2020).

Implementasi teknologi di era 5.0 masyarakat sudah mulai mempertimbangkan humaniora untuk menyediakan berbagai instrumen untuk mengatasi masalah sosial. Ini, tentu saja, membutuhkan manajemen SDM yang hati-hati; menurut Rustandi dalam (Yasa et al, 2021), hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi dengan mengefektifkan struktur birokrasinya di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menjalankan tugasnya. Kemudian, Mardawani & Relita (2019) memaparkan perlunya mengarahkan SDM aparatur birokrasi pada pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penyederhanaan regulasi. Perubahan cara kerja birokrasi.

Di era digital, setiap aspek keberadaan kita terjalin dengan jaringan komputer dan perangkat seluler yang membentuk infrastruktur informasi dan komunikasi (Kristian dkk., 2022). Dekade pertama abad ke-21 melihat kemajuan luar biasa dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dari 2010 hingga 2015, populasi global dengan koneksi internet meningkat dari 350 juta menjadi lebih dari 2 miliar (Situmorang, 2021). Di era digital saat ini, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya (Zamroni, 2009). Secara teoritis perkembangan teknologi yang masif menyebabkan sektor pemerintahan khususnya pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja pelayanan dan tata kelola agar lebih efisien, bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif (Putra, 2018). Melalui layanan elektronik dan seluler canggih, e-government bertujuan untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah; membuat penyampaian layanan publik lebih efektif, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat; meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan menjadikan lembaga publik lebih transparan dan akuntabel (Firdaus dkk, 2021).

Transformasi digital adalah kebutuhan bagi Society 5.0, karena kekuatan dan kecepatan yang luar biasa dari digitalisasi yang telah memasuki dan mengambil alih hidup kita, yang berarti bahwa banyak pemerintah daerah belum dapat beradaptasi dengannya (Banjarnahor dkk, 2022). Alasan utama dan terpenting untuk keadaan ini dalam organisasi adalah kurangnya aparatur pemerintah daerah terlatih, yang memungkinkan mereka memahami cara mengatasi perubahan ini (Junaidi, 2021).

Sementara banyak layanan administrasi publik telah membuat kemajuan besar, potensi penuh adaptasi digital masih belum dimanfaatkan. Panorama pemerintahan digital terus berubah untuk mencerminkan bagaimana pemerintah mencoba menemukan solusi digital yang inovatif di bidang sosial, ekonomi, dan politik dan bagaimana hal itu dapat mengubah proses pengambilan keputusan (Tulungen dkk, 2022). Kebutuhan perubahan organisasi yang meningkat saat ini mengubah, melalui transformasi digital, cara pemerintah daerah memandang praktik manajemen pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan sosial atau meningkatkan penyampaian layanan secara efektif. Memahami dan memprediksi perubahan ini sangat penting bagi pembuat kebijakan, eksekutif pemerintah, peneliti, dan semua orang yang menyiapkan, merancang, mengimplementasikan, atau mengevaluasi keputusan pemerintah daerah (Praetyo, 2020).

Konsep transformasi pemerintahan digital muncul sebagai salah satu strategi bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari jumlah penduduk yang besar dan luas daratan yang luas. Di sini, penulis memusatkan perhatian pada Provinsi Jawa Barat, salah satu provinsi terpadat dan berpengaruh secara politik di Indonesia. Jawa Barat, salah satu provinsi utama di Indonesia, memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi dan termuda di negara ini. Jawa Barat adalah salah satu provinsi paling produktif dan berdaya saing ekonomi di dunia berkat kualitas sumber daya manusia yang sangat baik, yang telah mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, di era teknologi ini, pemerintah daerah Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan baru, sama seperti daerah besar lainnya di Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah bagi pemerintah kota yang bertugas memastikan bahwa semua warga memiliki akses ke kebutuhan dasar seperti sekolah umum, rumah sakit, dan bentuk perawatan kesehatan lainnya.

B. METODE

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Sugiyono (2011) menyebutkan bahwa “penelitian kualitatif berfokus pada proses yang terjadi dan produk atau hasil. Para peneliti sangat tertarik untuk memahami bagaimana sesuatu terjadi. Artikel ini menggunakan metodologi studi kasus untuk memahami mengapa dan bagaimana fenomena sosial yang menarik terjadi melalui data. Metodologi studi kasus adalah pendekatan yang tepat untuk melakukan penelitian eksplorasi ini (Yin, 2008). Kajian ini juga bersifat induktif sehingga memberikan kontribusi untuk membangun pemahaman baru. Studi kasus di pemerintah daerah jarang terjadi, dan seringkali hanya mencakup isu-isu praktis tertentu dalam kebijakan dan administrasi publik. Hal-hal praktis seperti itu dapat mengatasi berbagai masalah: mulai dari menangani masalah yang terkait dengan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.

Desain penelitian ini dipilih karena sangat efektif dalam menangkap data empiris dari berbagai sumber sekunder (Snyder, 2019). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif mengikuti langkah-langkah analisis data (Miles & Huberman, 1994), yang meliputi pemadatan data, data display, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk memastikan keabsahan data, triangulasi dilakukan selama penelitian dengan cara mencocokkan tiga sumber (triangulasi). Tahapan ini diperlukan agar data yang diperoleh benar-benar valid sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selain bersifat klarifikasi, langkah ini digunakan karena dapat mengurangi data yang tidak perlu. Setidaknya ada empat bentuk dasar triangulasi yang dikemukakan oleh Denzin (2017), namun penelitian ini hanya menggunakan salah satunya yaitu triangulasi data (informan/sumber). Data yang dianggap valid adalah data yang memiliki kemiripan atau persamaan (saling menguatkan) antara satu sumber dengan sumber lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Digital Transformation di Indonesia

Pergeseran transformasi digital dari e-government menuju digital government memerlukan pengenalan inisiatif yang diperlukan untuk membuat perubahan yang lebih dalam dalam penyediaan layanan online melalui portal pemerintah, menjadi bisnis pemerintah yang lebih luas. Sistem berbasis teknologi baru yang 'diubah' tidak hanya harus ramah konsumen, digerakkan oleh strategi, dan mampu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi mereka yang berinteraksi dengan pemerintah, tetapi yang lebih penting, juga harus meningkatkan cara pemerintah beroperasi (Katharina, 2021).

Selain itu, pergeseran tersebut akan memungkinkan pemerintah untuk secara bersamaan memenuhi kebutuhan sektor publik itu sendiri; mengatasi tantangan pegawai sektor publik dan pembuat kebijakan; dan bermanfaat bagi seluruh warga negara. Purnamasari & Wardani (2020) memandang pergeseran ini sebagai pemberdayaan warga negara dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkontribusi atau memimpin penciptaan nilai publik,

yang seringkali diakui sebagai salah satu ciri utama transformasi pemerintahan digital. Oleh karena itu, transformasi digital menuju pemerintahan digital berpotensi mengubah interaksi warga-ke-pemerintah dalam dua cara: dengan meningkatkan penyampaian kebijakan dan layanan, dan dengan meningkatkan hubungan antara warga dan pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan melakukan berpikir ke depan, berpikir ulang, dan berpikir secara mendetail, runtut, dan konsisten (Wibawa & Antarini, 2020).

Menyadari besarnya manfaat transformasi digital, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Perencanaan Transformasi Digital menyampaikan lima arahan yang berfokus pada percepatan agenda transformasi digital nasional melalui lima langkah, yaitu: percepatan pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan internet services, penyiapan roadmap transformasi digital di sektor strategis, percepatan integrasi pusat data nasional, pengembangan SDM dan talenta digital, serta penyiapan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital (Setkab, 2020). Lima langkah percepatan transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi landasan pengembangan peta jalan Indonesia Digital. Digital Indonesia telah menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Keenam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kemampuan teknologi kelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat dengan budaya digital yang siap menghadapi masa depan. Selain itu, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 mengamanatkan beberapa fokus belanja untuk mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan Rp 30,5 triliun pada tahun 2021 untuk pengembangan TIK yang difokuskan pada beberapa aspek (Setkab, 2020).

- a. Percepatan transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah.
- b. Mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.
- c. Pemantapan dan optimalisasi infrastruktur, terutama yang digunakan dengan lintas sektoral.
- d. Mewujudkan inklusi masyarakat dalam mengembangkan wilayah prioritas dan mendorong pemerataan dengan penambahan akses internet di 4000 desa dan kecamatan.

Infrastruktur digital, percepatan transformasi digital, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia melalui pengetahuan ekonomi menjadi fokus belanja pemerintah pada tahun 2021. Pembangunan infrastruktur digital seperti internet memang dibutuhkan, mengingat masih adanya ketimpangan akses internet di Indonesia. Indonesia. Persentase rata-rata rumah tangga yang memiliki akses internet di rumah perkotaan dan pedesaan di Provinsi Jawa Barat mencapai 31,65%, sedangkan di Provinsi Papua hanya 10,06%, Provinsi Nusa Tenggara Timur 13,73% dan Provinsi Maluku 20,26%. Akses internet yang inklusif merupakan kebutuhan untuk mewujudkan transformasi digital, namun bukan satu-satunya faktor penentu. Faktor kunci lainnya termasuk kemampuan penelitian dan pengembangan (R&D), kemampuan inovasi produksi, dan kemampuan bakat. Sayangnya, kemampuan Indonesia dalam berbagai indikator tersebut belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. (katadata.co.id, 2019)

Indonesia sendiri memiliki potensi besar dalam memanfaatkan dan mengembangkan peluang digitalisasi. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, asumsi kontribusi ekonomi digital pada tahun 2020 sebesar 3,17%, dan pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 4,66%. Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 7,12%-7,54%, sedangkan pada tahun 2024 pertumbuhan PDB sebesar 7,54%-8,78% (Rudiyanto, 2020). Selain itu, kontribusi program digital Kementerian Komunikasi dan Informatika RI terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus meningkat. Hingga akhir tahun 2020, PNBP Kemkominfo mencapai Rp106,1 triliun. Pada periode 2015-2019, PNBP Kemkominfo tumbuh rata-rata 3

persen per tahun. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan dana infrastruktur baik melalui APBN maupun KPBU untuk membangun infrastruktur digital yang kuat dan inklusif.

Namun, dalam perkembangan terakhir, terdapat beberapa poin positif yang dapat menjadi titik balik transformasi digital di Indonesia. Hal itu terlihat dari kerjasama di tingkat pembuatan kebijakan, dukungan fiskal dan infrastruktur. Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia (SPBE) melibatkan instansi pemerintah lintas sektor; Kementerian Aparatur Negara dan RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perencanaan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Siber Nasional dan Badan Sandi Negara (BSSN). Kolaborasi dalam tata kelola memiliki implikasi bahwa semua pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab yang sama atas keputusan yang diambil, oleh karena itu kolaborasi mensyaratkan pihak-pihak yang terlibat harus duduk di meja yang sama dan memiliki kekuatan yang sama dalam pengambilan keputusan (Amri dkk, 2022).

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa berbagai upaya dan inisiatif telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak keluarnya Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang e-Government untuk optimalisasi pemerintahan digital di Indonesia, namun masih belum optimal. dan bahkan jauh dari yang diharapkan regulasi, meski tidak dipungkiri ada beberapa daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam membangun pemerintahan digital. Berdasarkan beberapa literatur yang ada, terdapat banyak faktor yang dapat menghambat dan menantang implementasi pemerintahan digital di Indonesia sebagai berikut:

- a. Belum adanya standarisasi yang jelas terkait implementasi pemerintahan digital dan kurangnya sosialisasi tentang bagaimana implementasi TIK secara nyata dan ideal untuk kolaborasi di pemerintah daerah, yang terkait dengan keberlanjutan inovasi kebijakan.
- b. Belum tersedianya sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola proses bisnis pemerintahan digital, yang menyebabkan kesenjangan antar birokrasi internal pemerintah.
- c. Jaringan infrastruktur teknologi dan informasi belum merata ke daerah (pemerintah daerah).
- d. Kurangnya keterlibatan masyarakat dan literasi digital terkait penggunaan TIK karena mayoritas penduduk berada pada kelompok menengah ke bawah.
- e. Kurangnya komitmen dari pembuat kebijakan tingkat atas di pemerintah daerah untuk mendukung implementasi pemerintahan digital, yang menghambat kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk warga. 6. Budaya organisasi yang kurang mendukung perubahan, dan budaya berbagi pengetahuan dan informasi yang rendah terutama antar instansi pemerintah.

2. Transformasi Digital Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Society 5.0

Melalui konsep pemerintahan digital, Pemprov Jabar bermaksud agar pemerintah hadir untuk rakyat – bukan sebaliknya. Opsi ini diwujudkan dengan menggandeng pihak ketiga dengan pemerintah provinsi agar masyarakat bisa mendapatkan layanan publik secara online (jabarprov.go.id, 2019a). Percepatan transformasi digital di Jawa Barat sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023. Penjabaran visi dan misi pada RPJMD dilakukan melalui inovasi dan kolaborasi, Pernyataan Visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 dengan terminologi “Inovasi” berarti pembangunan yang dilakukan di berbagai sektor dan daerah didukung oleh inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. “Kolaborasi” berarti perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dokumen RPJMD memperkenalkan pendekatan baru dalam pembangunan di Jawa Barat, salah satunya adalah pendekatan kolaboratif diantara , merupakan kolaborasi dengan pemangku kepentingan pembangunan yang lebih dikenal dengan ABCGM (Academic, Business, Community, Government, dan Media). Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak hanya terbatas pada proses atau metode yang telah dilakukan selama ini, tetapi juga disertai dengan berbagai bentuk reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian pula diharapkan terjalin kerjasama yang intensif antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, swasta, LSM, media, dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah signifikan untuk menyelaraskan pemerintahan digital dengan proses kolaborasi, strategi dalam pelibatan publik, penyediaan kebijakan dan penyampaian publik. Menurut Denis Anderson, et al (Anderson et al., 2015), upaya pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan publik secara adil, efektif, berpusat pada warga negara secara inklusif, dan sektor publik yang memiliki kapasitas untuk menyediakan pelayanan, perlu diperkuat di tingkat pusat dan daerah. Artinya, diperlukan upaya untuk memperkuat empat dimensi utama di sektor publik: (1) lembaga public terutama di tingkat daerah, untuk memberikan layanan; (2) kapasitas kepemimpinan dan sumber daya manusia diperlukan untuk memberikan pelayanan secara transparan, adil, efisien dan akuntabel; (3) proses dan mekanisme yang mendukung partisipasi masyarakat dalam desain dan penyampaian layanan; dan (4) budaya organisasi sehingga menciptakan ruang untuk perbaikan dan inovasi berkelanjutan dalam penyampaian layanan kepada masyarakat.

Dari aspek pemerintahan, tentunya percepatan upaya transformasi digital di pemerintahan ini tidak lepas dari keinginan untuk menciptakan sebuah organisasi yang mampu mengelola kolaborasi, sejalan dengan salah satu cita-cita Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. dalam pemerintahannya adalah mewujudkan Jawa Barat sebagai Provinsi Digital. Kekhawatiran ini bermula dari tingginya disparitas antara daerah pedesaan dan perkotaan dalam hal teknologi. Minimnya infrastruktur pendukung di pedesaan membuat warga desa sulit menikmati manfaat yang ditawarkan oleh teknologi digital. Hal inilah yang melahirkan gagasan pembentukan West Java Digital Service (JDS) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Informasi Digital, Data dan Geospasial unit di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang dicita-citakan menjadi mampu mempersempit kesenjangan digital, membantu efisiensi dan akurasi. pengambilan keputusan berbasis data dan teknologi, serta merevolusi penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan di Jawa Barat.

Visi JDS adalah mewujudkan Jawa Barat berbasis data dan teknologi untuk mendukung pelayanan masyarakat dan pembuatan kebijakan yang responsif, adaptif, dan inovatif. JDS memiliki 3 visi yaitu: 1) Data untuk Pendukung Keputusan - Sistem Merealisasikan pembuatan kebijakan berbasis data. 2) Transformasi Digital Pemerintah - Mempercepat transformasi digital pemerintah. 3) Meningkatkan Pengalaman Digital Warga Negara - Memudahkan kehidupan masyarakat dengan teknologi digital. Untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan tetap mengikuti perkembangan zaman, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi beberapa inovasi, antara lain penerapan konsep implementasi program Desa Digital (jabarprov.go.id, 2019b). Pada tahun 2021, program ini hadir dengan tema baru yang sejalan dengan agenda the 2021 United Nations Climate Change Conference (COP26) yaitu pengelolaan sampah terpadu (*waste management*) dan produksi kemasan ramah lingkungan (*biodegradable*) yang mengiringi inisiatif lain di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan dan multimedia. Tercatat 1904 desa menjadi penerima manfaat program Desa Digital.

Pelaksanaan program Desa Digital merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan perekonomian warga dengan memaksimalkan potensi desa melalui kerjasama dengan berbagai mitra. Pada tahun 2021, Desa Digital akan terus mengupayakan

pengadaan infrastruktur digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.(indra,2022) Tercatat hingga Maret 2021 telah terpasang total 353 VSAT (Very Small Aperture Terminal) dan telah dilakukan replikasi digital wi-fi village. Tidak hanya itu, dengan adanya akses digital, pemberian literasi digital melalui pendampingan mitra dan masyarakat juga semakin meningkat. Sebanyak 141 desa telah mendapatkan pelatihan literasi digital. Webinar literasi digital dengan konsep Training of Trainers juga digelar untuk meningkatkan literasi digital dan awareness terhadap informasi hoax, melalui perwakilan kader dari masing-masing daerah. Pemanfaatan potensi desa melalui ekonomi digital juga telah diterapkan di beberapa titik desa di Jawa Barat.

D. KESIMPULAN

Masyarakat 5.0 menjadi harapan sekaligus tantangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Proses transformasi digital pemerintah daerah di Indonesia sangat diperlukan, meliputi unsur-unsur berikut: penataan hukum dan kebijakan yang dapat memandu implementasi e-government; peningkatan sistem digital yaitu pusat data, jaringan intragovernment dan aplikasi yang lebih terintegrasi dan lugas; restrukturisasi birokrasi; meningkatkan kompetensi TIK birokrasi; perubahan budaya kerja yang mendorong aparatur bekerja secara digital; mengembangkan kepemimpinan yang bervisi digital, meningkatkan kerjasama sektoral dan menumbuhkan kerjasama antara pemerintah dan swasta serta penyediaan infrastruktur TIK khususnya akses internet yang merata hingga ke pelosok daerah. Pemerintah Daerah dalam hal ini Provinsi Jawa Barat dalam melakukan transformasi digital menuju pemerintahan digital mengimplemenasikan West Java Digital Service (JDS) dimana salah satunya adalah program desa digital yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga dengan memaksimalkan potensi desa bekerjasama dengan mitra.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, U., Adianto, A., & As'ari, H. (2022). Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12201-12207.
- Banabera, G. I. (2019). Analisis Inovasi Pemerintahan Digital Village dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(2), 203-212.
- Banjarnahor, A. R., Sinaga, J. B. M., Handiman, U. T., Samosir, K., Purba, B., Siagian, V., ... & Djufri, I. (2022). *Transformasi Digital dan Perilaku Organisasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Denzin, N. K. (2017). Critical qualitative inquiry. *Qualitative inquiry*, 23(1), 8-16.
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 226-239.
- Junaidi, F. (2021). Transformasi Digital, Pelayanan Publik Di Masa Pandemi. *Ekasakti Educational Journal*, 1(2), 278-292.
- Kristian, I., Tasdik, K., Finaldin, T., Yusuf, M. D., Komarudin, A., Nirwana, R., ... & Burhanudin, A. (2022, March). Digital Village. In 4th International Conference on Innovation in Engineering and Vocational Education (ICIEVE 2021) (pp. 267-271). Atlantis Press.
- Katharina, R. (2021). *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Kurniawan, M. A., & Andiyan, A. (2021). Disrupsi teknologi pada konsep smart city: Analisa smart society dengan konstruksi konsep society 5.0. *Jurnal Arsitektur Archicentre*, 4(2), 103-110.
- Mardawani, M., & Relita, D. T. (2019). Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam Mewujudkan Visi Pemerintahan dan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 109-116.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Nastiti, F. E., & Abdu, A. R. N. (2020). Kesiapan pendidikan Indonesia menghadapi era society 5.0. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 5(1), 61-66.
- Prasetyo, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Akselerasi Transformasi Digital Industri Kecil dan Menengah (Local Government Role in the Digital Transformation Acceleration of Small and Medium Industry). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 22(1), 59-75.
- Purnamasari, A. I., & Wardani, Y. I. (2020). Inovasi Layanan Transaksi E-Government Pada Bidang Perizinan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. *Prosiding Simposium Nasional "Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0"*, 569-596.
- Putra, R. M. D. (2018). *Inovasi Pelayanan Publik Di Era Disrupsi (Studi Tentang Keberlanjutan Inovasi E-Health Di Kota Surabaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Rudiyanto, A. (2020). Pengaruh Covid-19 terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. *Disampaikan pada Webinar Sustainability Talk: Menjaga Momentum Pencapaian SDGs Pasca-Corona*, 8.
- Situmorang, J. R. (2021). Kesiapan masyarakat Indonesia bertransformasi menjadi masyarakat digital.
- Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Sulastri, W., Kustiawan, D., Sinlae, A. A. J., & Irfan, M. (2021). Pengembangan Sistem E-Government Untuk Peningkatan Layanan Publik Pada Tata Kelola Administrasi Desa. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8(6), 177-183.
- Tulungen, E. E., Saerang, D. P., & Maramis, J. B. (2022). Transformasi Digital: Peran Kepemimpinan Digital. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(2).
- Wibawa, I. G. A., & Antarini, L. (2020). Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government). *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 57-71.
- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Fadhlurrohman, M. I. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 27-42.
- Yin, R. K. (2008). *Studi kasus: Desain & metode*.
- Zamroni, M. (2009). Perkembangan teknologi komunikasi dan dampaknya terhadap kehidupan. *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah*, 10(2), 195-211.